

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan keuangan oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan di Indonesia - BPK RI (temuan audit kelemahan pengendalian internal, temuan audit dari ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan opini audit), dan pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 34 kabupaten/kota sebagai sampel. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode regresi berganda.

Studi ini memberikan bukti bahwa hasil investigasi oleh BPK tentang temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan pemeriksaan temuan internal ketidakpatuhan terhadap peraturan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk pengawasan oleh legislatif tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa anggota legislatif belum optimal melakukan kinerja pengawasan.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan Pengawasan oleh Legislatif

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the financial investigation by the Supreme Audit Institutions in Indonesia – BPK RI (the audit findings of internal control weakness, the audit findings of non-compliance with regulations, and audit opinion), and supervision by the legislature on the performance of the government. Local government performance is an achievement for the organization of regional government affairs as measured from the inputs , processes, outputs , results, benefits , and / or impact .

The population in this study are the local governments in Southeast Sulawesi . The sampling technique used in this research is purposive sampling and obtained 34 districts/cities as samples. The data were analyzed using multiple regression method

This study provides evidence that the results of an investigation by the BPK about the audit findings of internal control weakness system and audit findings of non-compliance with regulations have significant negative effect on the performance of the local government, and the audit opinion have significant positive effect on the performance of the local government. while for oversight by the legislature does not significant effect on the performance of local governments. In other words, that the legislators did not optimum performance monitoring.

Keywords: Local Government's Performance, Audit Findings, Opinion Audit and Oversight by the Legislature

INTISARI

Otonomi daerah memberikan hak, kewajiban dan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, serta mengelola keuangan daerahnya. Namun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah, pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga pemerintah semakin menguat. Fenomena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik di Indonesia, sehingga pemerintah tidak lagi memperhatikan masalah-masalah input dan output saja, tetapi telah memasuki tahapan yang berorientasi pada proses dan kinerja.

Objek penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah (KSPIP) dan Ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan (KPDKPU) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan (3) Fungsi pengawasan DPRD (FPDPRD) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.